

STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR MINUM PEDESAAN DI KABUPATEN CIAMIS

Rahma Dewi¹⁾, Bambang Sucipto²⁾, Kharisma S.P²⁾, Bayu Pratama²⁾

**¹⁾Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al – Amin Indramayu
Jl. PU Kemped Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten
Indramayu, Telp/Fax. (0234) 508381**

**²⁾CV Sinaro Konsultan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata
Jl. Dadali – Elang Bandung**

e-mail:

marhamahrd85@gmail.com, bambang75@gmail.com,
kharismasyaefulohprastawa@gmail.com, Byu.pratama@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang tercantum dalam salah satu misi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019 yaitu “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Strategi pengelolaan air bersih harus memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor yang didasarkan pada 1). Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi, 2). Sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan, 3). Pembangunan berwawasan lingkungan, 4). Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat, 5). Keberpihakan pada masyarakat miskin, 6). Akuntabilitas proses pembangunan, 7). Peran pemerintah sebagai fasilitas, 8). Peran aktif masyarakat, dan 9). Pelayanan optimal dan tepat sasaran. Berdasarkan 9 (Sembilan) dasar strategi pengelolaan air minum secara umum tersebut maka strategi kebijakan pengelolaan air minum Kabupaten Ciamis harus berpihak pada masyarakat dan mewujudkan keberlanjutan. Strategi yang akan dilakukan terkait satu dengan lainnya secara komprehensif, serta berorientasi kepada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Guna pencapaian tujuan dalam setiap strategi pengelolaan air bersih, maka pendekatan kebijakan pengelolaannya melalui 3 (tiga) tipe pendekatan yaitu, Tipe A : berbasis lembaga, Tipe B : pengelolaan bersama dan Tipe C : pengelolaan berbasis masyarakat. Berdasarkan konsep pendekatan kelembagaan dan peraturan pengelolaan dan penyelenggaraan air minum, kebijakan yang akan diterapkan di Kabupaten Ciamis mengenai pengelolaan berbasis pada Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta. Dimana semua elemen yang terkait akan bertugas sesuai tupoksi masing-masing. Pemerintah daerah dibagi menjadi dua zona, yaitu zona perkotaan dan pedesaan. Zona perkotaan ditangani oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pengelolaan air jaringan perpipaan di perkotaan, sedangkan zona pedesaan akan dikelola oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup, yang akan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang sudah dan akan dibentuk untuk pengelolaan air minum.

Kata Kunci : strategi, pengelolaan, air minum pedesaan

ABSTRACT

Strategy For Rural Water Management Policy In Ciamis District. *Drinking Water Supply System Development is one of the policies established by the government of Ciamis regency in the Medium-Term Regional Development Plan (RPJMD) Ciamis regency in 2014-2019 which is listed in one of the development missions of Ciamis regency in 2014-2019 that is "Improving the Availability and Quality of Infrastructure and Environmental Management". Clean water management strategies must fulfill the needs of community from various sectors based on, 1). Water is a social and economic object, 2). As a basis in demand responsive approach, 3). Development of environmental insights, 4). Clean and healthy life behavior education, 5). Sidding with the poor, 6). Accountability of the development process, 7). The role of government as a facility, 8). Optimal service and right on target, 9). Based on the 9 (nine) basics of drinking water management strategies in general, drinking water management policy strategy of Ciamis regency must take sides with community and realize sustainability. The strategies that will be carried out are related to one another comprehensively, and are oriented towards implementing policies and achieving goals. In order to achieve goals in each clean water management strategy, the management policy approach is through 3 (three) types of approaches namely, Type A: institution based, Type B: joint management and Type C: community based management. Based on the concept of an institutional approach and regulations on the management and operation of drinking water, the policy that will be implemented in Ciamis regency regarding the management which are based on district/city government, community and private sector. Where all the relevant elements will be assigned according to their respective duties and functions. The regional government is divided into two zones, namely urban and rural zones. The urban zone is managed by the Cipta Karya Sanitation and layout and collaborate with institutions of piped water management in urban areas, while the rural zone will be managed by the Residential Housing and environment, which will work with communities and institutions will be formed for drinking water management.*

Keywords : *strategy, management, rural drinking water*

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengamanatkan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Amanat tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kementerian PU dengan menetapkan Permen Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 dan Permen PU Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA, 2018).

Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan arah pengembangan sistem penyediaan air minum dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Selain itu dengan

ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut, pemerintah daerah dapat lebih terarah dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum (JAKSTRADA, 2018).

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang tercantum dalam salah satu misi pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yaitu "Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Pengelolaan Lingkungan Hidup" (JAKSTRADA, 2018).

Kebutuhan air minum akan terus meningkat dan harus diiringi pula dengan peningkatan kualitas dan kebijakan yang semakin baik. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu strategi kebijakan pengelolaan air minum di Kabupaten Ciamis, agar pendistribusian air minum dapat dirasakan oleh semua masyarakat dan strategi yang dibuat dapat

dijadikan dasar arah pengembangan system peyediaan air minum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan air minum, kajian pustaka terdahulu dan hasil survey lapangan. Semua kegiatan penelitian dikombinasikan dan menghasilkan strategi yang tepat untuk diterapkan / dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Tahapan penelitian, yaitu :

1. Identifikasi kebijakan terdahulu
2. Survey lapangan
3. Analisis data, meliputi hasil lapangan, kebijakan dan konsep strategi
4. Penetapan strategi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Kebijakan

Sistem pengelolaan air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor dan perubahan kebijakan pembanguna air minum yang didasarkan kepada (Yudo, 2005) :

1. Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi

Saat ini masyarakat menganggap bahwa air merupakan benda sosial (*public good*) yang dapat diperoleh secara gratis dan tidak mempunyai nilai ekonomi. Anggapan ini membuat masyarakat tidak menghargai air sebagai benda yang langka dan memiliki nilai ekonomi, sehingga masyarakat mengeksploitasi air secara bebas dan berlebihan. Untuk merubah anggapan dan perilaku tersebut diperlukan usaha kampanye publik dan sosialisasi kepada lapisan masyarakat bahwa air merupakan benda langka yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Sehingga diharapkan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan air akan berubah, lebih bijak dalam mengeksploitasi air, lebih efisien dalam memanfaatkan air, berkorban dalam mendapatkan air. Prinsip utama dalam pelayanan air minum adalah “ pengguna / pemakai harus membayar atas pelayanan yang diperolehnya.”

2. Pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan

Pendekatan tanggapan kebutuhan (*demand responsive approach*) menempatkan masyarakat pada posisi teratas dalam pengambilan keputusan dalam hal pemilihan system yang akan dibangun, pendanaan dan tata cara pengelolaannya. Untuk meningkatkan efektivitas pendekatan tersebut, pemerintah sebagai fasilitator harus memberikan pilihan yang diinformasikan kepada masyarakat. Pilihan yang diinformasikan tersebut menyangkut seluruh aspek pembangunan air minum, seperti teknologi, pembiayaan, lingkungan sosial-budaya, kelembagaan pengelolaan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan, biaya produksi dan pemeliharaan.

3. Pembangunan berwawasan lingkungan

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber air ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan air minum mulai dari sumber air, pengambilan air baku, pengelolaan air minum, jaringan distribusi air minum dilaksanakan dengan mempertimbangkan kaidah dan norma kelestarian lingkungan.

4. Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat

Mengubah perilaku masyarakat melalui pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini merupakan komponen utama dalam pembangunan air minum selain komponen fisik prasarana dan sarana air minum.

5. Keberpihakan pada masyarakat miskin

Pembangunan air minum harus memperhatikan dan melibatkan secara aktif kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tidak mampu lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Upaya agar mereka tidak terabaikan dalam pelayanan air minum, sehingga kebutuhan mereka akan air minum dapat terpenuhi secara layak, adil dan terjangkau.

6. Akuntabilitas proses pembangunan

Dalam era desentralisasi dan keterbukaan maka pembangunan air minum harus menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap prasarana dan sarana air minum yang dibangun serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenal lebih dini sistem pengelolaannya.

7. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Proses pemberdayaan masyarakat adalah pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah memberi kesempatan kepada pihak lain yang berkompeten serta mendorong inovasi untuk meningkatkan pelayanan air minum. Fasilitas berupa bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana air minum serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

8. Peran aktif masyarakat

Seluruh masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan air minum. Keterlibatan tersebut dapat pula melalui perwakilan yang demokratis serta mencerminkan dan mempresentasikan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat.

9. Pelayanan optimal dan tepat sasaran

Pembangunan air minum harus optimal dan tepat sasaran, maksud optimal adalah kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan nyaman serta terjangkau semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan kebijakan dasar dan umum yang dipaparkan diatas, strategi kebijakan pengelolaan air minum Kabupaten Ciamis harus berpihak pada masyarakat dan mewujudkan keberlanjutan. Strategi yang akan dilakukan terkait satu dengan lainnya secara komprehensif, serta berorientasi kepada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan, sebagai berikut :

1. Strategi 1

Masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum. Keterlibatan masyarakat dari tahap awal (penentuan sumber air minum yang akan digunakan), model pengambilan sumber daya air (perpipaan atau non perpipaan), pelaksanaan dilapangan hingga kesepakatan pengelolaannya.

2. Strategi 2

Meningkatkan investasi untuk pengembangan kapasitas sumber daya masyarakat pengguna. Investasi yang semakin meningkat maka tingkat pelayanan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum akan lebih baik.

3. Strategi 3

Mendorong penerapan pilihan-pilihan pembiayaan untuk pembangunan, dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum. Investasi bisa berupa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, investor atau dana retribusi masyarakat. Hal tersebut disesuaikan dengan kesepakatan awal dalam hal pengelolaan system air minum yang diselenggarakan.

4. Strategi 4

Pelaksanaan pembangunan air minum harus menempatkan kelompok pengguna dalam pengambilan keputusan pada seluruh tahapan pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana air minum. Ketika kelompok pengguna dilibatkan maka rasa memiliki akan sarana dan prasarana yang ada akan semakin meningkat dan terpelihara.

5. Strategi 5

Meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat di bidang teknik, pembiayaan, dan kelembagaan, dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum. Kebocoran pipa saluran air minum, pemnafaatan air minum yang tidak terorganisir selama ini merupakan cerminn ketidakmampuan dan pemahaman masyarakat, sehingga strategi 5 ini harus masuk dalam

pelaksanaan kebijakan pembangunan air minum.

6. Strategi 6

Menyusun norma, standar pedoman dan manual (NSPM) sektor air minum dan penyehatan lingkungan sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan pada tahap memperbaiki kualitas pelayanan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, operasional, pemeliharaan, dan pengelolaan. NSPM bisa diadopsi dari peraturan PP no. 16 tahun 2015 dan Permen no.27 tahun 2016, serta Review RISPAM Kabupaten Ciamis tahun 20015.

7. Strategi 7

Mendorong konsolidasi penelitian, pengembangan dan diseminasi pilihan teknologi untuk mendukung prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemerintah biasa bekerjasama dengan para ahli/pakar, baik dari kampus, konsultan ahli dan praktisi. Bentuk konsolidasi penelitian bisa berupa kegiatan bantuan desa, KKN dan program pemerintah berkenaan air bersih dan kelestarian lingkungan. Kabupaten Ciamis masih luas sekitar 364.872,74 Ha merupakan daerah tangkapan air dan juga seperti hutan dan lahan-lahan kosong, sehingga hal ini sangat memungkinkan dilakukan pengembangan dan penelitian untuk memperluas wilayah sumber air minum.

8. Strategi 8

Mengembangkan motivasi masyarakat melalui pelatihan – pelatihan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup yang melindungi badan air, sumber mata air dan kebersihan air. Selain itu menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan system saluran air minum perpipaan dan non perpipaan. Kegiata terutama untuk daerah pedesaan yang sulit terjangkau oleh system pengelolaan air perpipaan perkotaan (PDAM).

9. Strategi 9

Menginformasikan perubahan pendekatan dalam pengelolaan prasarana dan sarana air minum, dari pendekatan berdasarkan batasan

administrasi menjadi pendekatan system. Air merupakan milik negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh negara untuk kemaslahatan masyarakat. Pemanfaatan air tidak terbatas ruang, sehingga antara satu daerah bisa bekerjasama dengan daerah lain untuk pengelolaannya.

10. Strategi 10

Menerapkan upaya khusus pada masyarakat yang kurang beruntung untuk mencapai kesetaraan pelayanan air minum. Pedesaan yang jauh dari jangkauan saluran air perkotaan yang selama ini terjangkau PDAM, bisa mendapatkan air secara layak , mudah dan murah. Upaya ini harus dalam pengawasan, pendidikan dari pemerintah daerah.

11. Strategi 11

Mengembangkan pola monitoring dan evaluasi hasil pembangunan prasarana sarana air minum yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran. Sehingga seluruh masyarakat dapat mendapatkan air minum yang layak dan sesuai dengan kebutuhan.

12. Strategi 12

Mengembangkan komponen kegiatan monitoring dan evaluasi dalam 4 tingkat, antara lain :

- Monitoring dan evaluasi pada tingkat masyarakat pengguna;
- Monitoring dan evaluasi pada tingkat kabupaten/kota;
- Monitoring dan evaluasi pada tingkat provinsi; dan
- Monitoring dan evaluasi pada tingkat pusat

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada *Lampiran 1 Diagram Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Air Minum Perdesaan di Kabupaten Ciamis.*

3.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Ciamis

Menurut Yudo (2005), Kebijakan pengelolaan air minum mempunyai tiga pendekatan pengelolaan yaitu pengelolaan berbasis lembaga (Tipe A),

kombinasi dari pengelolaan berbasis lembaga dan pengelolaan berbasis masyarakat (Tipe B) dan pengelolaan berbasis masyarakat (Tipe C).

1. Pengelolaan Berbasis Lembaga (Tipe A)

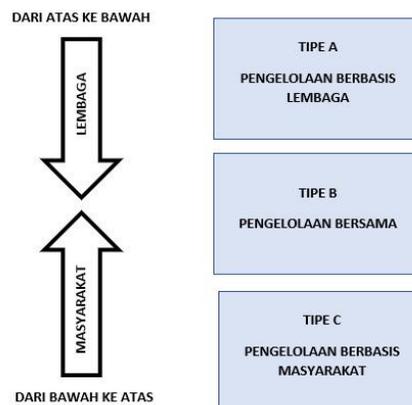
Pada tipe A ini, pengambilan keputusan dalam manajemen adalah lembaga. Lembaga ini memegang kekuasaan tertinggi dalam perumusan rencana, rancangan, operasi dan pemeliharaan dan sarana serta pengelolaan pelayanannya. Apabila ada lembaga lain yang melakukan satu atau dua dari aspek-aspek tersebut, lembaga ini dapat berkonsultasi dapat pula tidak dengan para pelanggannya, dan hubungan dengan mereka semata-mata bersifat komersil. Pelanggan membayar uang sebagai biaya penyambungan dan selanjutnya secara periodik diwajibkan membayar biaya pelayanan. Pengelolaan berbasis lembaga ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tipe ini bisa diterapkan di Kabupaten Ciamis pada zona perkotaan.

2. Pengelolaan Bersama Lembaga dan Masyarakat (Tipe B)

Kategori Tipe B terjadi karena tumpang tindihnya cakupan wilayah masing-masing pengelolaan lembaga dan pengelolaan oleh masyarakat. Pendekatan Tipe B membuka peluang hibrida antara keduanya, dimana beberapa elemen dikelola oleh lembaga sedangkan elemen-elemen lain oleh masyarakat pengguna. Kerjasama pengelolaan didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial, namun segala urusan didalamnya sepenuhnya dikembalikan kembali kepada masyarakat yang bersangkutan. Sehingga ada kegiatan penyediaan air bersih oleh dilakukan oleh dua lembaga dalam pengelolaannya dan atas kesepakatan kerjasamanya. Seperti di Kabupaten Ciamis, zona penyediaan air bersih perpipaan seluas 89.655,76 Ha dan non perpipaan 70.358,47 Ha, pengelolaannya bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan Tipe B. Hal ini disebabkan, karena akan ada tumpang tindih dilapangan ketika penyediaan dan pengelolaannya.

3. Pengelolaan Berbasis Masyarakat (Tipe C)

Karakteristik yang paling menonjol dari pengelolaan tipe ini adalah bahwa kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan atas seluruh aspek yang mengangkat air minum berada di tangan anggota masyarakat, mulai dari tahap awal identifikasi kebutuhan pelayanan air minum, perencanaan tingkat pelayanan yang diinginkan, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, hingga ke pengelolaan operasional. Dalam waktu tertentu selama proses perkembangan mereka dapat memproses fasilitas dari pihak luar, misalnya informasi tentang berbagai alternatif teknologi dan bantuan teknis (semisal kontraktor, pengusaha, atau lembaga profesional), namun keputusan terakhir tetap berada di tangan masyarakat sendiri. Pemerintah sebagai lembaga pengawas kegiatan penyediaan air minum pada Tipe C ini. Sehingga tetap setiap kegiatan dalam pengawasan pemerintah daerah.



Gambar 1. Pendekatan Pengelolaan Penyediaan Air Minum

Berdasarkan konsep pendekatan kelembagaan dan peraturan pengelolaan dan penyelenggaraan air minum, kebijakan yang akan diterapkan di Kabupaten Ciamis mengenai pengelolaan dan pelaksanaannya, berbasis pada Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan swasta. Dimana semua elemen yang terkait akan bertugas sesuai tupoksi masing-masing. Pemerintah daerah dibagi menjadi dua zona, yaitu zona perkotaan dan pedesaan. Zona perkotaan ditangani oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang dan

bekerjasama dengan lembaga-lembaga pengelolaan air jaringan perpipaan di perkotaan, sedangkan zona pedesaan akan dikelola oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup, yang akan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang sudah dan akan dibentuk untuk pengelolaan air minum.

Kebijakan tersebut didasarkan pada PP no. 16 Tahun 2015 dan Permen no.27 Tahun 2016, bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan air minum diserahkan pada pemerintah daerah bekerjasama dengan BUMN, BUMD, Koperasi, Pemerintahan di Desa dan Kecamatan juga lembaga-lembaga yang dibentuk. Tetapi dalam pengawasan dilapangan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan selalu dilaaporkan secara berkala. Untuk lebih jelas mengenai Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Ciamis, dapat dilihat pada **gambar 1**.

4. SIMPULAN

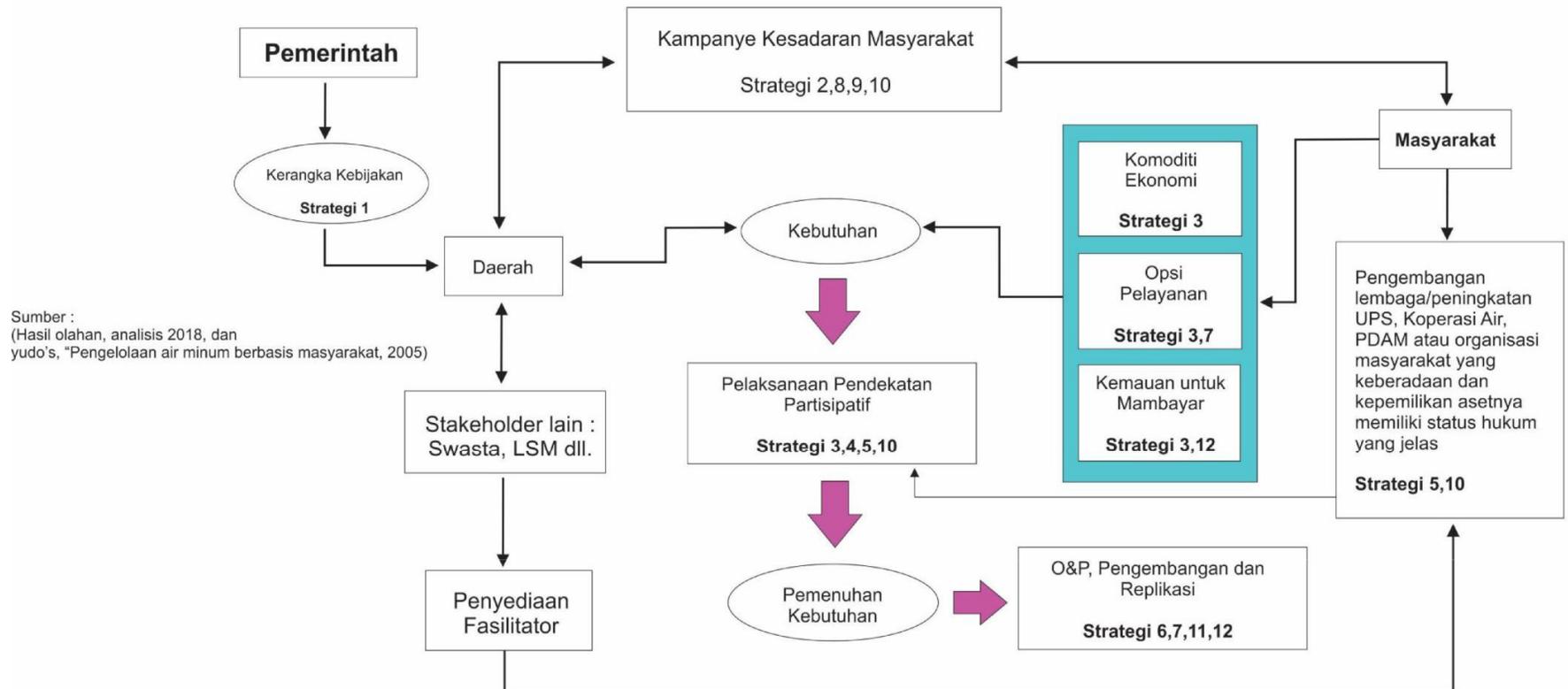
Strategi Kebijakan Pengeloaalan Air Minum berdasarkan kajian yang telah dilakukan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bias parsial. Kebijakan harus mempertimbangkan aspek social, ekonomi serta teknis. Sehingga dari system kebijakan, strategi dan pengelolaannya tidak terjadi tumpang tindih. Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan air bersih pun menjadi tugas penting bagi pemerintah, agar keberlanjutan air bersih bias terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada). (2018) Kabupaten Ciamis
- Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 20014 – 2019
- Permen PU Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum mengamanatkan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)

Yudo, S. (2005). Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat. *Jurnal Air Indonesia, PTL-BPPT*.

DIAGRAM STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AIR MINUM PERDESAAN DI KABUPATEN CIAMIS



Lampiran 1. *Diagram Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Air Minum Perdesaan di Kabupaten Ciampis.*